

Perkembangan Studi Hubungan International

Yessi Olivia*

Abstract

Abstract: This paper describes the development of International Relations (IR) as a study. While the interest to learn how states interact with one another and how power influences the relationship can be traced back in the works of Kautilya and Thucydides hundred of years ago, the modern study of IR is still considered as a new discipline. This can be seen by the fact that the first opening of IR class was established in 1919 following the end of World War I. The paper will focus on how almost century later the study of IR has improved significantly in terms of epistemology, ontology, as well as methodology, due to the complexity of the international system.

Keywords: International Relations, knowledge, epistemology, ontology, methodology.

Pendahuluan

Tulisan ini dibuat untuk memperlihatkan perkembangan Studi Hubungan Internasional (SHI) sejak SHI menjadi kajian akademik formal pada tahun 1919 di Universitas Wales di Aberystwyth Inggris (sekarang menjadi Universitas Aberystwyth). Dalam usianya yang hampir mencapai satu abad, SHI telah banyak mengalami perkembangan baik secara epistemologis, ontologis dan metodologis. Secara epistemologis dan metodologis misalnya, perdebatan antar paradigma di dalam SHI telah menyumbangkan berbagai macam pendekatan teoritis dalam memahami isu-isu hubungan internasional. Lalu secara ontologis, SHI telah menjadi kajian dengan objek kajian yang luas dan tidak lagi berpatokan pada superioritas negara sebagai aktor penting dalam hubungan internasional. Terkait dengan metodologi, perdebatan metodologis antara dua kelompok besar di dalam SHI memperlihatkan dinamika akademik yang menunjukkan bahwa SHI bukanlah disiplin ilmu yang biasa-biasa saja. Analisis terhadap perkembangan SHI dalam tulisan ini diharapkan bisa menjadi pemahaman dalam melihat SHI sebagai sebuah kajian ilmu dan bagaimana para akademisinya terlibat dalam upaya mencapai kondisi state of the art di dalam SHI.

* Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Riau.

Untuk membahas hal-hal tersebut, maka tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama akan dibahas tentang gambaran SHI secara umum, yaitu: sejarah berdirinya SHI, tentang komponen-komponen keilmuan yang menjadi pembentuk SHI dan tentang perbedaan penamaan dalam SHI. Di bagian kedua akan dibahas mengenai perubahan-perubahan di dalam SHI sebagai cabang ilmu politik, mulai dari epistemologi, ontologi dan metodologinya. Dan di bagian terakhir akan direview tentang dampak perkembangan epistemologis, ontologis dan metodologis ini terhadap HI sebagai sebuah ilmu.

Gambaran SHI Secara Umum

Pertama, definisi dari SHI (*study of international relations*) mengalami perubahan. Awalnya, SHI didefinisikan sebagai studi tentang hubungan-hubungan antar negara.¹ Hubungan-hubungan tersebut hanya terbatas pada keamanan dan perang saja. Definisi tersebut berubah ketika aktor-aktor di dalam politik dunia bertambah dan bentuk hubungan menjadi lebih kompleks. Kini bisa dikatakan bahwa SHI adalah ilmu yang membahas tentang hubungan-hubungan antar aktor, baik itu negara, non negara (seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional) bahkan individu di dalam sistem internasional. SHI dalam hal ini, melihat pada segala jenis hubungan “harmoni ataupun konflik, damai ataupun perang, sipil ataupun militer, politis maupun ekonomis”.²

Pada perkembangannya, SHI memiliki beberapa penamaan lain. Hal ini bisa dilihat dari konsep yang digunakan oleh beberapa jurusan di berbagai universitas di dunia ataupun dari beberapa buku teks yang ditulis oleh para ilmuwan hubungan internasional, mulai dari:

¹ Chris Brown, 2001. *Understanding International Relations*, 2nd ed., New York: Palgrave

² J.C. Johari, 1985. *International Relations and Politics (Theoretical Perspectives)*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, hal. 9

*international studies*³, *international politics*⁴, bahkan *global politics*⁵. Penamaan ini sebenarnya menimbulkan perdebatan tersendiri. Untuk istilah ‘politik internasional’ misalnya, SHI sebenarnya juga mempelajari politik internasional dengan fokus kajian yang lebih sempit mengenai interaksi negara-negara dalam konteks *power politics* (tentang perang dan keamanan). Sementara itu ada yang berpendapat bahwa dengan semakin luasnya kajian di dalam HI, istilah *global politics* dinilai lebih pas untuk digunakan daripada ‘hubungan internasional’.⁶ Hal yang menarik juga di dalam penamaan ini adalah sebagian orang berpendapat bahwa ‘hubungan internasional’ adalah ilmu yang kajiannya lebih sempit dan hampir mirip dengan pengertian politik internasional yang memfokuskan pada kajian hubungan antar negara, seperti: perang, diplomasi, keamanan, dan hubungan ekonomi.⁷

Kedua, SHI adalah sebuah kajian ilmu yang masih muda umurnya (diperkenalkan pertama kali tahun 1919). Dunia saat itu baru saja dihadapkan dengan Perang Dunia I yang banyak mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan materi. Masyarakat dunia saat itu disibukkan dengan usaha-usaha rekonstruksi pasca perang. Selain perbaikan infrastruktur akibat perang, masyarakat dunia juga melakukan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya perang yang serupa. Woodrow Wilson misalnya, memprakarsai terbentuknya lembaga internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia, yaitu Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1919. Di Inggris, usaha mencegah terjadinya perang dilakukan melalui dunia pendidikan. Seorang David Davies misalnya memberikan bantuan sebesar £20.000 kepada Universitas Wales (sekarang menjadi University Aberystwyth) untuk membentuk sebuah lembaga (yang diberi nama *The Woodrow Wilson Chair*) yang ditujukan untuk mempelajari

³ Beberapa universitas menawarkan program studi International Studies, seperti: Universitas Carolina Utara, Universitas George Washington, Universitas Melbourne.

⁴ Beberapa penulis menggunakan istilah *international politics* bukan *international relations*. Misalnya: *Theory of International Politics*, oleh Kenneth Waltz (1979), *International Politics on the World Stage* oleh John T. Rourke (1995). Walaupun begitu, beberapa penulis tetap memisahkan antara *international politics* dengan *international relations*. Hosti (1995) misalnya menekankan bahwa yang dimaksud dengan *international politics* adalah interaksi antar negara melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya, sementara Johari (1985) melihat *international politics* lebih sempit konteksnya dibandingkan dengan *international relations* karena hanya melihat pada *game power* antar negara.

⁵ Salah satunya adalah buku Andrew Heywood, 2011. *Global Politics*, London: Palgrave Macmillan

⁶ Burchill & Linklater, *op.cit.*, hal. 9

⁷ Pembedaan ini ditemukan di dalam mata kuliah Global Politics yang ditawarkan di Departemen Ilmu Politik di California State University, Los Angeles, Amerika Serikat: <http://instructional1.calstatela.edu/tclim/W11_Courses/374_w11.htm>

tentang alasan-alasan manusia untuk berkonflik, berperang dan tentang kerugian yang diakibatkan oleh perang. Tak lama setelah dibukanya lembaga tersebut, beberapa universitas lain baik di Inggris maupun Amerika Serikat membuka jurusan yang sama.⁸

Ketiga, patut diketahui bahwa SHI adalah sebuah disiplin ilmu yang terbentuk dari gabungan dari beberapa disiplin ilmu sebelumnya. Beberapa disiplin ilmu tersebut antara lain adalah⁹:

1. Hukum internasional. Hukum internasional menekankan pada aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur hubungan antar negara-negara yang ada di dunia. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan para ahli hukum seperti Hugo Grotius sangat berpengaruh di sini.
2. Sejarah diplomasi. Diplomasi adalah bagian dari instrumen kebijakan luar negeri sebuah negara. Ilmu diplomasi sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang dan hasil karya Thucydides dari Yunani dan Niccolo Machiavelli dari Italia dipandang sebagai bagian penting dari perkembangan diplomasi sebagai sebuah ilmu.
3. Ilmu kemiliteran (*the art of war*). Ilmu kemiliteran bahkan lebih tua keberadaannya dari pada hukum internasional dan diplomasi. Ilmu kemiliteran berbicara mengenai: sejarah militer, strategi dan taktik, organisasi militer, teknologi militer dan disiplin dan moral. Kontributor ilmu kemiliteran mulai dari Sun Tzu di Cina hingga Carl von Clausewitz dari Prussia memiliki pengaruh yang besar terhadap pemimpin negara maupun pimpinan militer dari berbagai negara.
4. Politik internasional. Politik internasional adalah cabang ilmu politik yang membahas tentang dimensi kekuatan (*power*) dan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan (*political equilibrium*) dalam interaksi negara-negara di dunia.
5. Organisasi internasional (OI). Studi mengenai organisasi internasional adalah termasuk kajian yang baru. OI mulai berkembang pasca Perang Dunia I seiring

8 Department of International Politics, 2011. *The Legacy of One Man's Vision*, University of Aberystwyth, diakses dari <<http://www.aber.ac.uk/en/interpol/about/>>, pada tanggal 5 November 2011

9 Suwardi Wiratmadja, 1967. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Surabaya: Penerbit Tinta Mas, lihat juga Walter Carlsnaes, Thomas Risso & Beth A Simmons, 2002. *Handbook of International Relations*, London: SAGE Publications Ltd

dengan semakin banyaknya kerjasama antar negara yang diwujudkan melalui pembentukan organisasi internasional.

6. Perdagangan internasional. Ilmu perdagangan internasional berkembang pada abad ke 17 ketika aktivitas perdagangan internasional semakin meningkat.
7. Pemerintahan jajahan (*colonial government*). Bahasan-bahasan mengenai pemerintahan jajahan telah dimulai sejak masa Yunani dan Romawi kuno.
8. Pelaksanaan hubungan luar negeri (*conduct of foreign relations*). Membahas tentang pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara.

Perkembangan-perkembangan di dalam SHI

Pada bagian sebelumnya telah digambarkan SHI secara umum. Bagian berikut ini akan menganalisis perkembangan-perkembangan SHI, baik secara epistemologis, ontologis dan metodologis sejak SHI berdiri pada tahun 1919. Dari perkembangan ini akan terlihat bagaimana perkembangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: perubahan isu-isu di dalam politik dunia, globalisasi dan tren di dalam ilmu sosial sendiri.

1. Perkembangan Epistemologi: '*The Great Debates*'

Seorang Thomas Kuhn pada tahun 1962 menulis tulisan yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Tulisan Kuhn berisikan pendekatan baru dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Kuhn menerangkan bahwa sebuah ilmu terkait dengan tahapan-tahapan yang masing-masingnya didominasi oleh serangkaian asumsi yang kemudian dinamai sebagai paradigma¹⁰. Paradigma yang dominan pada dasarnya adalah sebuah kerangka yang berisikan asumsi-asumsi yang terbentuk melalui proses dialektika dan diakui keberadaannya sebagai akumulasi dari kebijakan. Paradigma ini memberikan semacam arahan untuk asumsi dasar mengenai dunia dan menentukan pertanyaan apa yang bisa ditanyakan dan bisa dijawab. Paradigma ini menurut Kuhn tidak akan bertahan lama seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia dan ketidakmampuan paradigma tersebut menjelaskan anomali-anomali yang ada.¹¹

¹⁰ Paradigma adalah sekumpulan asumsi, konsep dan nilai-nilai yang membentuk pandangan suatu kelompok ilmuwan. Menurut Kuhn, sebuah paradigma itu memiliki sekumpulan asumsi, teori, contoh masalah-masalah yang sudah terselesaikan, prosedur-prosedur eksperimen.

¹¹ Scott Burchill & Andrew Linklater, 1996. *Theories of International Relations*, London: Macmillan Press

Kuhn bukanlah seorang ilmuwan sosial, namun oleh ilmuwan SHI, tulisan Kuhn ini dijadikan dasar untuk menggambarkan perjalanan SHI sebagai sebuah ilmu. SHI telah mencapai pada tahapan-tahapan di mana terbentuk paradigma-paradigma yang memiliki asumsi berbeda satu sama lain. Namun, berbeda dengan pandangan Kuhn tentang adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*), hal itu tidak terjadi di dalam SHI. Di antara ilmuwan SHI saat ini telah tercapai semacam kesepakatan atau konsensus bahwa untuk memahami hubungan internasional penstudi HI bisa menggunakan paradigma yang cocok untuk digunakan dalam menganalisis sebuah peristiwa.¹²

Terkait dengan keberadaan paradigma di dalam SHI, setidaknya telah terjadi empat perdebatan besar antara paradigma-paradigma yang ada. Fokus perdebatan tersebut adalah seputar: (1) apakah SHI tersebut berbicara tentang pemahaman (*understanding*) atau penjelasan (*explanation*) dan (2) pendekatan apa yang baiknya digunakan dalam memahami ataupun menjelaskan sebuah peristiwa. Hingga perdebatan ke empat, yang berlangsung pada dekade 80-90an, secara epistemologis SHI terbagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang berusaha untuk menjelaskan fenomena HI melalui pendekatan saintifik, disebut juga sebagai kelompok positivis. Kedua adalah kelompok yang menolak pendekatan saintifik yang digunakan oleh kelompok pertama karena penelitian di dalam ilmu sosial cenderung bias dan tidak bebas nilai. Kelompok terakhir ini disebut sebagai kelompok post positivis.

Debat pertama terjadi dalam kurun waktu 1930-1950an, antara kelompok idealis (*utopian liberalism*) dengan kelompok realis. Istilah ‘debat’ di sini sebenarnya tidak begitu tepat digunakan, karena debat dalam arti yang sebenarnya tidak terjadi. Dikotomi idealis/utopis dengan realis sendiri baru ramai digunakan pada awal Perang Dingin. Hanya saja mengingat besarnya pengaruh ‘debat pertama’ di dalam narasi sejarah SHI, banyak ilmuwan HI yang kemudian menerimanya sebagai sesuatu yang benar terjadi.¹³

Jadi apa sebenarnya terjadi sangat terkait dengan kondisi pecahnya Perang Dunia II dan tidak relevannya pemikiran-pemikiran liberal-institisionalis yang dikemukakan oleh orang-orang seperti Woodrow Wilson, Norman Angell dan Alfred Zimmern. Mereka, mengusung optimisme liberalisme tentang manusia sebagai makhluk yang rasional dan

12 Rizal Sukma, 1995. *Hubungan Internasional Dekade 1990-an: Hegemoni, Dekonstruksi, dan Agenda*, Jurnal Ilmu Politik No. 15, hal. 4.

13 Lihat tulisan Lucian M. Ashworth, 2002. “Did the Realist-Idealist Great Debate Really Happen? A Revisionist History of International Relations”, *International Relations*, Vol. 16, No. 1

memilih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Orang-orang yang kemudian dilabeli sebagai idealis/utopis ini juga berbicara tentang upaya untuk menciptakan perdamaian dunia melalui penerapan hukum internasional maupun organisasi internasional.¹⁴ Organisasi internasional yang diprakarsai pembentukannya oleh Wilson pada tahun 1919, Liga Bangsa Bangsa, akhirnya bubar pada tahun 1941 seiring dengan pecahnya Perang Dunia II.

Perang Dunia II menunjukkan bahwa kerja sama tidak sepenuhnya terwujud melalui ide saling ketergantungan (*interdependence*) dan LBB gagal dalam menahan ambisi ekspansionis negara-negara anggotanya. Ide-ide pemikir realis klasik seperti Thucydides, Machiavelli dan Hobbes, yang berbicara tentang power dan power politics diangkat kembali oleh ilmuwan HI saat itu. E.H. Carr adalah salah seorang pemikir dari kelompok realis yang mengkritik optimisme kelompok idealis. Melalui bukunya yang berjudul *The Twenty Years' Crisis* ia berargumen bahwa kondisi harmonis tidak mungkin tercapai karena negara-negara terlibat dalam konflik untuk mencapai kepentingan masing-masing. Tulisan penting lainnya adalah karya J.H. Morgenthau, seorang Jerman yang melarikan diri ke Amerika Serikat (AS) ketika Nazi berkuasa. Di dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations: The Struggle for Power*, Morgenthau berpendapat bahwa hubungan internasional itu bentuknya konflikual karena tiap-tiap negara terlibat dalam usaha untuk mencapai kekuasaan (*the struggle for power*). Baik Carr maupun Morgenthau, walaupun memiliki perbedaan cara pandang, memiliki pandangan yang sama terkait dengan pesimisme kerja sistem internasional, dan keduanya memandang bentuk sistem internasional yang anarkis akan menjadi fitur tetap hubungan internasional.¹⁵

Di dalam debat pertama, kelompok realis yang memfokuskan penelitian mereka pada *power politics*, isu-isu keamanan, agresi, konflik dan perang, dapat dikatakan sebagai kelompok pemenang. Hal ini bisa dimaklumi mengingat kelompok ini bisa memberikan penjelasan teoritis tentang kondisi dunia ketika Perang Dunia II dan Perang Dingin terjadi. Realisme SHI dalam perkembangannya, tidak hanya memiliki pengaruh pada dunia akademik tetapi juga pada kalangan praktisi seperti politisi dan diplomat.¹⁶

¹⁴ Robert Jackson & Georg Sørensen, 1999. *Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *ibid.*

Debat kedua di dalam perkembangan SHI terjadi pada dekade 1960an. Debat terjadi antara dua kelompok yang berbeda dalam memahami SHI. Kelompok pertama adalah kelompok tradisionalis, pemikir-pemikir awal SHI yang menekankan pada upaya ‘memahami’ (*understanding*) HI. Sementara kelompok kedua memiliki fokus yang berbeda, yaitu tentang upaya ‘menjelaskan’ (*explaining*). Kelompok kedua ini disebut dengan kelompok behavioralis. Selain istilah tradisional vs. behavioralis, istilah lain yang digunakan adalah tradisionalisme vs. sains.¹⁷

Kemunculan kelompok behavioralis ini sangat signifikan terlihat pasca Perang Dunia II. Para ilmuwan yang dikategorikan sebagai behavioralis berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, seperti ilmu politik, ekonomi, bahkan matematika. Hal ini berbeda dengan pemikir HI sebelumnya yang berasal dari kalangan diplomat, ahli sejarah, ahli hukum internasional maupun dari politisi. Baik kelompok tradisionalis maupun kelompok behavioralis memiliki perbedaan dalam perlakuan mereka terhadap obyek penelitiannya. Kelompok behavioralis yang berpijak pada pertanyaan “bisakah membuat hukum saintifik yang obyektif tentang hubungan antar manusia” melihat obyek penelitian mereka layaknya seorang saintis dari ilmu alam meneliti di laboratorium.¹⁸ Mereka berada di luar obyek penelitiannya. Dalam upayanya memberikan penjelasan, mereka menerapkan tahapan-tahapan penelitian yang dilalui oleh ilmuwan dari ilmu eksakta, seperti mengumpulkan data, membuat hipotesis dan menguji hipotesis untuk menghasilkan kesimpulan. Hal ini berbeda dengan kelompok tradisionalis menempatkan dirinya bersamaan dengan obyek penelitiannya. Dalam hal ini, penelitian tentang hubungan antar manusia menurut mereka tidak bisa terlepas dengan hal-hal seperti seperti moralitas dan etika.

Debat berakhir tanpa ada pemenang atau kejelasan tentang siapa yang kalah. Semacam kesepakatan tercapai bahwa upaya yang dilakukan baik oleh kelompok tradisionalis maupun behavioralis memiliki kelebihan dan kekurangan satu sama lain, dan keduanya bisa saling melengkapi. Hanya saja sepanjang Perang Dingin, metode kuantitatif yang dibawa oleh kelompok behavioralis memang mendominasi SHI, terutama oleh ilmuwan HI di AS. Ambisi saintifik kelompok behavioralis juga berpengaruh terhadap kemunculan neo-realisme dan neo-liberalisme di dalam SHI.¹⁹

¹⁷ Morton A. Kaplan, 1966. “The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations”, *World Politics*, Vol. 19, No. 1

¹⁸ Jackson & Sørensen, *op.cit.*, hal:47

¹⁹ *ibid.*

Sejak SHI berdiri hingga dekade 1960an, dominasi politik internasional oleh negara-negara besar di dalam perdebatan sesama ilmuwan HI sangat terasa keberadaannya. Isu-isu yang terkait dengan ekonomi ataupun negara-negara Dunia Ketiga yang banyak muncul pasca Perang Dunia II, belum mendapat perhatian penuh di dalam SHI. Perhatian terhadap keberadaan negara-negara Dunia Ketiga baru terasa ketika pada dekade 1970an negara-negara tersebut menuntut perubahan terhadap sistem ekonomi internasional yang dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju. Keadaan ini dimanfaatkan oleh sejumlah ekonom kiri (neo-Marxis) untuk membuat teori tentang ketertinggalan Dunia Ketiga dalam hal ekonomi.²⁰ Misalnya Andre Gunder Frank yang melihat pada hubungan antara keterbelakangan ekonomi dengan eksplorasi kelompok kapitalis. Atau Immanuel Wallerstein yang melihat kecilnya kemungkinan negara-negara Dunia Ketiga untuk keluar dari hubungan *core-periphery* dengan negara-negara kapitalis.²¹

Persoalan ekonomi politik internasional (*international political economy*-IPE) ini menjadi fokus **debat ketiga** di dalam SHI. Debat terjadi sepanjang dekade 1970-1980an antara kelompok neo-realism dan neo-liberalism dengan kelompok Marxis. Kelompok neo-Marxis menyampaikan kritik kepada kelompok neo-realism dan neo-liberalism terkait dengan ketimpangan ekonomi yang terjadi di dunia. Terinspirasi dari ajaran Karl Marx, mereka berpendapat bahwa ketertinggalan ekonomi di Dunia Ketiga disebabkan oleh dominasi Dunia Pertama. Di dalam sistem ekonomi internasional, yang kapitalis Dunia Ketiga tidak diberikan kesempatan untuk merubah kondisi mereka karena negara-negara Dunia Pertama menginginkan hubungan superior-inferior tetap ada. Kondisi di mana negara-negara Dunia Ketiga hanya berperan sebagai pemasok bahan-bahan baku dan negara-negara Dunia Pertama sebagai produsen manufaktur menyebabkan timbulnya hubungan ketergantungan (*dependence*) antara Dunia Ketiga terhadap Dunia Pertama.²²

Kelompok IPE liberal (istilah lainnya liberalisme komersial) memiliki pandangan yang kontras sekali dengan kelompok neo-Marxis. Menurut mereka, ekspansi kapitalisme global diperlukan untuk mencapai kemakmuran dan perdamaian bagi seluruh masyarakat dunia. Kelompok IPE liberal dalam hal ini, sangat mendukung keberadaan institusi

20 *ibid.*, hal. 57

21 Stephen Hobden & Richard Wyn Jones, "Marxist Theories of International Relations" di dalam John Baylis, Steve Smith, Patrick Owens, 2008. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press.

22 Jackson & Sørensen, *loc.cit.*

finansial global, negara-negara kaya dan perusahaan multinasional yang dipercaya mampu membantu tercapainya kemakmuran dan perdamaian tersebut.²³ Sementara kelompok IPE realis memiliki pandangan yang berbeda dengan liberal maupun Marxis. Berangkat dari pemikiran merkantilis klasik, di mana peran negara sangat penting dalam menyokong aktivitas perekonomiannya, kelompok IPE realis menekankan pada kekuatan politik (*political power*) dalam isu-isu perekonomian. Hal ini kemudian dilanjutkan kepercayaan bahwa untuk memperlancar urusan perdagangan bebas diperlukan sebuah kekuatan dominan (*hegemonic power*). Robert Gilpin bahkan menyebutkan bahwa “tanpa adanya kekuatan yang dominan maka tidak akan tercapai ekonomi liberal”²⁴

Di dalam debat ketiga ini tampak perubahan di dalam SHI. Apabila di awal kemunculannya isu-isu yang dibahas lebih banyak berbicara tentang politik dan militer, debat ketiga terlihat bahwa isu-isu seperti ekonomi dan sosial mendapat perhatian besar. Faktor pendorongnya tentu saja kemunculan negara-negara bekas jajahan yang dikenal dengan sebutan Dunia Ketiga yang memiliki isu-isu sosioekonomi yang berbeda dengan negara-negara maju. Isu lain yang menjadi perhatian ilmuwan SHI adalah kemunculan aktor-aktor non negara, seperti perusahaan multinasional dan organisasi non pemerintah (NGO) yang perannya menjadi penting seiring meningkatnya saling keterhubungan (*interdependence*) di antara negara-negara di dunia.

Tiga paradigma yang telah disebutkan di dalam tulisan ini; realisme, liberalisme dan neo-Marxisme adalah tiga paradigma utama (*mainstream*) di dalam SHI. Beberapa penamaan lain untuk paradigma utama ini adalah: realisme, pluralisme, strukturalisme; *state-centric*, *multi centric* dan *global centric* atau *billiard-ball*, *cobweb* dan *layer-cake*.²⁵ Sementara Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi memilih istilah realisme, pluralisme dan globalisme untuk menunjukkan tiga paradigma utama di dalam HI.

Setidaknya hingga Perang Dingin berakhir, ketiga paradigma ini mencirikan besarnya pengaruh positivisme di dalam SHI. Positivisme adalah paham yang terkait dengan upaya membangun pengetahuan dari “eksperimen-eksperimen, observasi, dan deduksi (menggunakan metode saintifik)”. Dunia dalam hal ini adalah obyek penelitian

23 Steven L. Lamy, “Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism” di dalam John Baylis, Steve Smith, Patrick Owens, 2008. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press.

24 Jackson & Sørensen, *op.cit.*, hal:58

25 Rizal Sukma, *op.cit.*, hal. 16

yang bisa diteliti secara objektif, bebas nilai dan tanpa melibatkan perasaan. Di dalam perspektif positivis, teori hanya bertujuan untuk menjelaskan (*explanatory*): “teori-teori adalah alat untuk menjelaskan dunia dan tergantung dengan bagaimana kecocokan mereka dengan realita, maka teori tersebut bisa dikatakan benar atau salah”.²⁶

Dominasi positivistik di dalam SHI mulai dipertanyakan oleh pendekatan-pendekatan lain (diisitilahkan dengan pendekatan post-positivis). SHI dalam hal ini, kembali mengalami perdebatan akademik. Di dalam **debat keempat** ini, yang menjadi fokus perdebatan antara kelompok positivis dengan kelompok post-positivis, yang diwakili oleh teori kritis, feminism, poststrukturalisme, postkolonialisme, konstruktivisme dan *green politics*, adalah hubungan antara teori dengan realita. Bagi kelompok post positivis, penelitian tidak terlepas dari nilai dan bias si peneliti, oleh karena itu setiap teori yang dimunculkan pasti memiliki asumsi yang tersembunyi di dalamnya. Tidak seperti kelompok positivistik yang melihat teori memiliki fungsi penjelasan (*explanatory*), kelompok post positivistik menganggap teori memiliki sifat konstitutif (*constitutive*). Artinya teori itu ada karena mendapat pengakuan dari masyarakat.²⁷

Debat antara kelompok positivis dan kelompok post positivis juga tidak menghasilkan pemenang. Kritik kelompok post positivis terhadap kelompok positivis tetap berlangsung. Walaupun begitu paradigma-paradigma *mainstream*, khususnya realisme dan liberalisme masih berpengaruh besar di dalam SHI. Berikut di bawah ini adalah tabel perkembangan epistemologi SHI:

Tabel 1: Tahap-tahap Perdebatan dalam SHI

		Debat 1			
		Idealisme	Realisme		
Fokus:			Fokus:		
1.	Hukum internasional		1.	<i>Power Politics</i>	
2.	Organisasi internasional		2.	Keamanan	
3.	Interdependensi		3.	Agresi	
4.	Kerjasama		4.	Konflik	
5.	Perdamaian		5.	Perang	
		Debat 2			
		Tradisionalisme	Behavioralisme		
Pemahaman			Penjelasan		

26 Heywood, *op.cit.*, hal. 75

27 *ibid.*

<ol style="list-style-type: none"> 1. Norma dan nilai 2. Penilaian (<i>judgement</i>) 3. Pengetahuan bersifat historis <p>Neo-realisme & Neo-liberalisme</p> <p>Neo-realisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hegemoni untuk menjamin keberlangsungan sistem kapitalisme 2. Rezim internasional <p>Neo-liberalisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar bebas 2. Institusi keuangan internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data 2. Menguji hipotesis 3. Pendekatan saintifik; kuantitatif <p>Debat 3</p> <p>Strukturalisme</p> <p>Fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem kapitalis merugikan negara-negara Dunia Ketiga 2. Dependensi Dunia Ketiga terhadap Dunia Pertama 3. Keterbelakangan pembangunan di Dunia Ketiga
---	---

*Sumber: Robert Jackson & Georg Sørensen, 1999. *Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press*

Tabel 2: SHI secara Epistemologis (Debat 4)

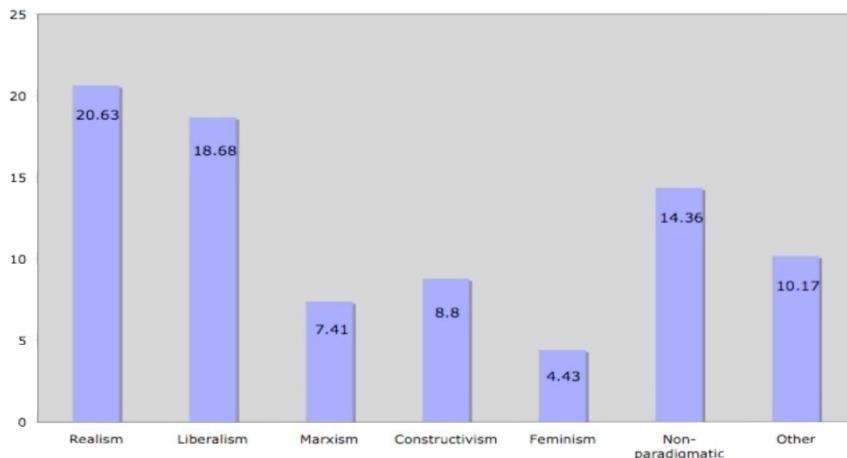
<p>Positivisme</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fenomena sosial bisa dijelaskan melalui penggunaan metode saintifik. b. Pengetahuan obyektif yang didapat melalui pemodelan, teori ataupun konsep adalah kebenaran faktual. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Realisme/neorealisme • Liberalisme/neoliberalisme • Neo-Marxisme (strukturalisme) </div>	<p>Post positivisme</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian yang obyektif (bebas nilai) terhadap fenomena sosial sulit tercapai. b. Fenomena sosial tidak bisa diteliti melalui pendekatann saintifik. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruktivisme • Teori kritis • Feminisme • Post strukturalisme • Post kolonialisme • <i>Green politics</i> </div>
--	---

*Sumber: Robert Jackson & Georg Sørensen, 1999. *Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press*

Patut diketahui bahwa walaupun perdebatan di dalam SHI menunjukkan perkembangan epistemologis di mana dominasi paradigma mainstream dipertanyakan, realita menunjukkan bahwa paradigma utama SHI, terutama realisme dan liberalisme tetap menjadi paradigma yang paling banyak digunakan. Pertama karena paradigma realisme dan liberalisme adalah paradigma yang paling bisa memberikan penjelasan teoritis terhadap fenomena hubungan internasional. Hasil penelitian *Teaching Research and International Policy* (TRIP) tahun 2007 ini menunjukkan alokasi pengajaran paradigma SHI di kelas lebih banyak membahas paradigma-paradigma utama tersebut.²⁸

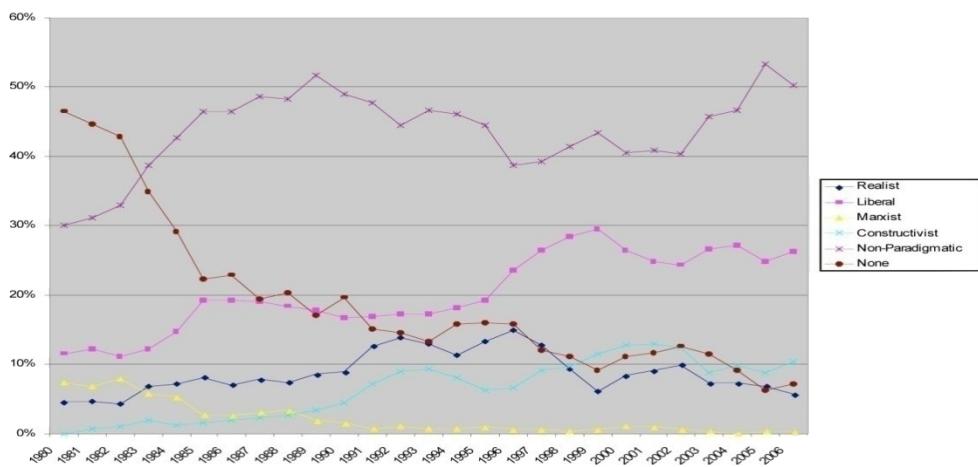
²⁸ Daniel Maliniak, et al., 2007. *The International Relations Discipline*, 1980-2006, Makalah pertemuan tahunan American Political Science Association Agustus/September 2007.

Diagram 1: Alokasi Waktu Pengajaran Paradigma di MK. Pengantar Ilmu HI



Sumber: Daniel Maliniak, et al., 2007. *The International Relations Discipline, 1980-2006*, Makalah pertemuan tahunan American Political Science Association Agustus/September 2007, hal. 8

Grafik 1: Persentase Artikel HI Per Paradigma



Sumber: Daniel Maliniak, et al., 2007. *The International Relations Discipline, 1980-2006*, Makalah pertemuan tahunan American Political Science Association Agustus/September 2007, hal. 9

2. Perkembangan Ontologi

Perkembangan ontologi SHI terkait dengan perkembangan epistemologi seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Pada awal SHI berdiri, obyek kajian SHI hanya terbatas pada negara. Paradigma mainstream, terutama realis, lebih banyak menghabiskan waktu melakukan penelitian kuantitatif terhadap isu-isu seperti penangkalan (*deterrence*), bipolaritas, anarki dalam sistem internasional, ketertiban (*order*) dan rasionalitas di dalam politik luar negeri.²⁹

Isu-isu di dalam SHI kemudian meluas dan tidak lagi melihat negara sebagai obyek kajian utama. Perluasan isu di dalam SHI ini sangat terasa dengan globalisasi yang ditandai dengan penemuan-penemuan teknologi dan semakin kaburnya batas-batas negara. Istilah ‘hubungan internasional’ bahkan dinilai tidak lagi cocok untuk digunakan mengingat luasnya kajian SHI. Berikut adalah gambaran kajian-kajian SHI masa kini³⁰:

Tabel 2: Kajian-kajian di dalam SHI

Bentuk hubungan	saling ketergantungan ekonomi (<i>economic interdependence</i>), hutang luar negeri Dunia Ketiga dan ketergantungan (<i>dependence</i>), perdagangan internasional, bentuk-bentuk baru identitas politik dan kewarganegaraan, rezim internasional, masyarakat internasional (<i>international society</i>), anarki internasional, asosiasi ekonomi regional, perimbangan kekuatan (<i>balance of power</i>), demokratisasi, keamanan pasca Perang Dingin, transnasionalisme, perang, konflik, kerjasama negara (<i>nation states</i>), perusahaan transnasional, pasar finansial, NGO, komunitas supra dan sub-nasional, pasukan penjaga perdamaian, kelompok pemberontak, gerakan-gerakan sosial baru (misalnya gerakan perempuan dan kelompok-kelompok pecinta lingkungan), organisasi internasional, pengungsi, kelompok teroris
Aktor	
Isu-isu empiris	distribusi kekuatan militer, <i>arms control</i> , globalisasi dan fragmentasi, kesenjangan global, hak asasi manusia, intervensi dan kedaulatan, bantuan luar negeri dan bantuan kemanusiaan, pengungsian, etnisitas, isu-isu perempuan, jender, isu-isu yang terkait dengan konservasi lingkungan, penyakit menular (seperti AIDS, flu burung), narkotika, kejahatan transnasional, kemiskinan, <i>peace keeping & peace building</i> , <i>just war</i> , baik atau tidaknya intervensi kemanusiaan, perdebatan tentang redistribusi kekuatan dan kekayaan, kewajiban terhadap alam, saling menghormati perbedaan kebudayaan, hak-hak perempuan dan anak-anak
Isu-isu etik	

Sumber: Scott Burchill, et al., *Theories of International Relations*, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan

3. Perkembangan Metodologi

Selain perdebatan mengenai isu-isu substantif, misalnya apa penyebab terjadinya perang atau apakah demokrasi akan mengekalkan perdamaian, perdebatan penting lainnya di dalam SHI adalah mengenai metodologi. Perdebatan metodologi biasanya membahas hal-hal filosofis tentang bagaimana penelitian baiknya dilakukan; apakah bisa menggunakan pendekatan saintifik, apakah asumsi realis bahwa sifat dasar manusia agresif atau asumsi liberalis bahwa manusia suka bekerja sama itu benar, dan lain sebagainya.³¹

30 Scott Burchill, et al., *Theories of International Relations*, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, hal. 13

31 Jackson & Sørensen, *op.cit.*, hal.218

Ketika awal berdiri sebagai sebuah kajian, orang-orang liberalisme idealis yang meneliti tentang HI kebanyakan berasal dari kalangan non akademik. Perhatian terhadap metodologi tidak terlalu banyak diperhatikan, karena fokus tulisan mereka bukan pada upaya menjelaskan, tapi lebih kepada hal-hal yang harusnya diterapkan di dunia agar terhindar dari perang. Reaksi kelompok realis (dalam debat pertama), tidak melihat kelemahan metodologi kelompok liberalisme idealis. Fokus kritikan kelompok realis ada pada kelemahan-kelemahan pandangan kelompok idealis tentang bagaimana sistem internasional seharusnya bekerja.³²

Isu mengenai metodologi baru muncul pada dekade 1950-1960an, seiring dengan berkembangnya revolusi behavioralis di kalangan ilmuwan politik di AS. Di dalam debat kedua, walaupun tidak ada kejelasan tentang siapa yang menang ataupun kalah, kelompok behavioralis (terutama dari kelompok neo-realism mendominasi SHI dan kelompok tradisional menjadi minoritas di dalam SHI. Pasca usainya Perang Dingin, dominasi ini kemudian mendapat tantangan dari kelompok yang tergabung dalam post positivis.³³ Berikut di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang metodologi positivis dan metodologi post positivis.

a. Metodologi Positivis

Patut diketahui bahwa metodologi positivis di dalam HI memiliki tradisi behavioralisme yang kuat. Pertama “dunia sosial dan politik, termasuk dunia internasional, memiliki pola-pola yang bisa diterangkan melalui metodologi yang tepat”.³⁴ Kedua, kelompok behavioralis percaya bahwa tidak ada perbedaan antara ilmu alam dengan ilmu sosial dan metode yang digunakan dalam ilmu alam juga bisa digunakan dalam ilmu sosial. Ketiga, teori-teori saintifik bisa didapat melalui pengamatan dan pengalaman. Keempat, bahwa pengetahuan objektif bisa didapat melalui pengujian hipotesis. Kelima, menekankan pada proposisi yang empiris dalam membuat teori. Menurut Vasquez, teori-teori HI harus memiliki proposisi empiris yang logis dan bisa diuji. Berikut adalah tujuh kriteria dari sebuah teori yang empiris menurut Vasquez³⁵:

³² *ibid.*

³³ *ibid.*

³⁴ *ibid.*, hal. 228

³⁵ *ibid.*, hal. 229

1. Akurat dan terbatas
2. Non-relativis (universal)
3. Bisa diverifikasi dan difalsifikasi
4. Dapat memberikan penjelasan yang kuat
5. Terbuka terhadap perbaikan
6. Konsisten terhadap pengetahuan
7. *Parsimonious* (penyederhanaan asumsi di dalam pembuatan teori)

Kenneth Waltz memberikan sejumlah persyaratan untuk menentukan sebuah teori HI dapat dikatakan positivis atau tidak. Perhatikan bahwa persyaratan yang diajukannya ini memiliki kemiripan dengan serangkaian tes yang dilakukan di laboratorium³⁶:

1. Pilih teori yang hendak diuji
2. Lihat hipotesisnya
3. Uji hipotesis dalam serangkaian tes pengamatan dan eksperimen
4. Dalam melakukan langkah 2 dan 3, gunakan definisi-definisi yang terdapat di dalam teori yang sedang diuji
5. Hilangkan variabel pengganggu
6. Lakukan sejumlah percobaan dalam waktu yang berbeda
7. Apabila tes tetap gagal lihat kembali apakah teori gagal sepenuhnya atau hanya memerlukan perbaikan, atau memerlukan penyempitan cakupan dari klaim-klaim penjelasnya.

Besarnya pengaruh behavioralisme di dalam positivisme HI bisa dilihat dari penelitian-penelitian neorealis yang menekankan pada penelitian kuantitatif dan penggunaan teori-teori permainan (*game theories*) di dalam analisisnya.

b. Metodologi Post Positivis

Untuk diketahui post positivisme di dalam SHI tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan. Ada berbagai pendekatan post positivis yang berbeda, bahkan di dalam satu pendekatan sekalipun. Misalnya postmodernisme atau feminism yang memiliki variasi-variasi tersendiri. Berikut di bawah ini adalah beberapa aliran post positivis di dalam SHI:

36 *ibid.*, hal. 230

Teori Kritis (*Critical Theory*)

Teori Kritis yang memiliki keterhubungan dengan ajaran Marxis ini dikembangkan oleh sekelompok ilmuwan Jerman yang dikenal dengan nama aliran Frankfurt (*Frankfurt School*). Salah seorang filsuf dari aliran Frankfurt yang terkenal dalam kajian sosial kontemporer adalah Jürgen Habermas. Walaupun teori kritis berakar dari pemikiran Marxis, fokus kajian mereka tidak pada masyarakat ekonomi namun lebih banyak membahas tentang “kebudayaan, birokrasi, dasar sosial otoriterianisme, struktur dari keluarga dan membahas tentang rasionalitas dan teori tentang pengetahuan”.³⁷ Dalam hal ini kelompok Teori Kritis menolak asumsi positivistik tentang “realitas eksternal yang obyektif, pembedaan antara subyek dengan obyek dan ilmu sosial yang bebas nilai”³⁸. Ilmu sosial, menurut Teori Kritis tidak melakukan penelitian dengan memisahkan antara si peneliti dengan obyek yang diteliti, karena si peneliti adalah bagian dari obyek kajiannya.

Bagi kelompok ini pengetahuan memiliki bias karena dibentuk oleh pandangan masyarakat tertentu. Positivistisme di dalam HI menurut mereka menghasilkan teori (mereka sebut sebagai *problem solving theory*) yang berat sebelah dan menguntungkan kelompok *status quo*. Kelompok Teori Kritis berusaha untuk mencari pengetahuan yang memiliki tujuan-tujuan politik, seperti: “membebaskan manusia dari struktur politik dunia yang opresif dan perekonomian dunia yang dikuasai oleh kekuatan-hegemon”³⁹. Teori-teori yang dicoba dirumuskan oleh kelompok Teori Kritis adalah teori yang emansipatoris (*emancipatory theory*), atau teori yang berbicara tentang perubahan ke arah yang lebih baik bagi semua orang, bukan sebagian kecil orang saja.

Kelemahan metodologi Teori Kritis terletak pada masalah kemandirian akademik. Kalaulah pendapat Robert Cox tentang ‘teori adalah milik seseorang dan memiliki tujuan-tujuan tertentu’ adalah benar, maka kebenaran teori akan ditentukan oleh kekuatan politik. Padahal seharusnya pengetahuan dan seorang ilmuwan harus bisa mandiri tanpa pengaruh dari manapun. Ditambah lagi perdebatan akademik tidak mungkin terwujud, karena perdebatan akademik yang ada hanyalah perdebatan politik semata. Kritikan juga disampaikan kepada kelompok Teori Kritis terkait dengan ide emansipasi yang tidak memiliki kejelasan dan sangat ambigu.⁴⁰

³⁷ Stephen Hobden & Richard Wyn Jones, *op.cit.*, hal. 153

³⁸ *ibid.*, hal. 232

³⁹ *ibid.*, hal. 233

⁴⁰ Stephen Hobden & Richard Wyn Jones, *op.cit.*, hal. 154

Postmodernisme

Postmodernisme adalah teori sosial yang bukan muncul belakangan di dalam SHI. Awal kemunculan postmodernisme sendiri diinisiasi oleh sekelompok filsuf Perancis yang menolak filsafat eksistensialisme yang saat itu mendominasi. Sama seperti kelompok teori kritis yang berbicara tentang ‘penjara konseptual’ (*conceptual prisons*), kelompok postmodernis kebenaran obyektif yang diangkat oleh eksistensialis. Bagi mereka penelitian terhadap fenomena sosial tidak akan menghasilkan kebenaran obyektif, karena bentuk dari ilmu sosial yang tidak netral. Terdapat faktor sejarah, budaya dan politik yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosial.

Postmodernisme masuk ke dalam SHI pada dekade 1980an dengan Richard Ashley sebagai salah seorang promotornya. Kritikan postmodernis lebih banyak ditujukan kepada kelompok neo-realism yang mempercayai bahwa mereka telah menemukan kebenaran empiris dalam HI. Menurut postmodernis, anggapan bahwa kondisi sistem internasional yang anarkis adalah sesuatu kebenaran seakan-akan menunjukkan negara-negara tidak memiliki pilihan selain beradaptasi dengan kondisi anarkis tersebut. Hal tersebut menyebabkan kelompok neorealist mengalami kesulitan dalam memahami perubahan di dalam hubungan internasional.

Kritikan postmodernis tentang kegiatan teorisasi tidak terlepas dari ego akademisi menunjukkan kelemahan dari klaim kebenaran yang dimiliki oleh kelompok neo-realism. Neo-realisme ternyata memang tidak sepenuhnya bisa menjelaskan fenomena hubungan internasional. Postmodernisme dalam hal ini memberikan masukan bagi dunia akademik tentang keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dalam membuat pengetahuan. Apabila kemampuan postmodernis untuk menggugah dunia akademik dianggap sebagai sebuah kekuatan, kelemahan postmodernisme terletak pada klaimnya bahwa ilmu sosial tidak bisa netral. Sebagai bagian dari ilmu sosial, tentunya postmodernisme tidak terlepas dari nilai yang dipercayai penelitiannya. Postmodernisme juga dikritik memiliki kecenderungan menjadi nihilisme, karena kritik yang disampaikannya malah akan menjauhkannya dari dunia sosial dan politik.⁴¹

Konstruktivisme

⁴¹ *ibid.*, hal. 238

Kelompok konstruktivis melihat bahwa obyektivitas di dalam ilmu sosial adalah bentukan manusia (*human construction*) dan atas kesadaran manusia itu sendiri (*human consciousness*). Kelompok ini melihat bagaimana hubungan antara materi dan ide berpengaruh terhadap bagaimana aktor menginterpretasikan realita. Tatanan dunia (*world order*) misalnya, tercipta bukan hanya karena pengaruh negara-negara besar, tetapi juga bagaimana pemahaman terhadap tatanan internasional (*international order*) itu berubah.⁴² Sama seperti postmodernisme, konstruktivisme adalah disiplin ilmu yang terpisah dan terbentuk jauh sebelumnya. Pelopor konstruktivis di dalam SHI antara lain adalah Alexander Wendt, Friedrich Kratcovil dan Nicholas Onuf.

Fokus perhatian kelompok konstruktivis adalah penjelasan saintifik yang diklaim oleh kelompok behavioralis. Konstruktivisme melihat bahwa penelitian tentang dunia sosial memiliki sifat intersubyektif, artinya penelitian tersebut hanya akan berguna bagi orang-orang yang membuatnya dan yang memahaminya. Sebuah teori sosial dalam hal ini, memiliki keterbatasan bahwa teori tersebut akan bermanfaat pada saat dan tempat tertentu saja. Namun, terlepas kritik terhadap positivisme di dalam HI, konstruktivisme sebenarnya juga memiliki kesamaan dengan positivisme terkait dengan kemungkinan diakumulasikannya pengetahuan tentang dunia melalui pembentukan teori-teori empiris. Dalam hal ini, kelompok konstruktivis percaya bahwa pengumpulan pengetahuan tersebut bisa dilakukan melalui penyebaran ide-ide (*shared knowledge*).

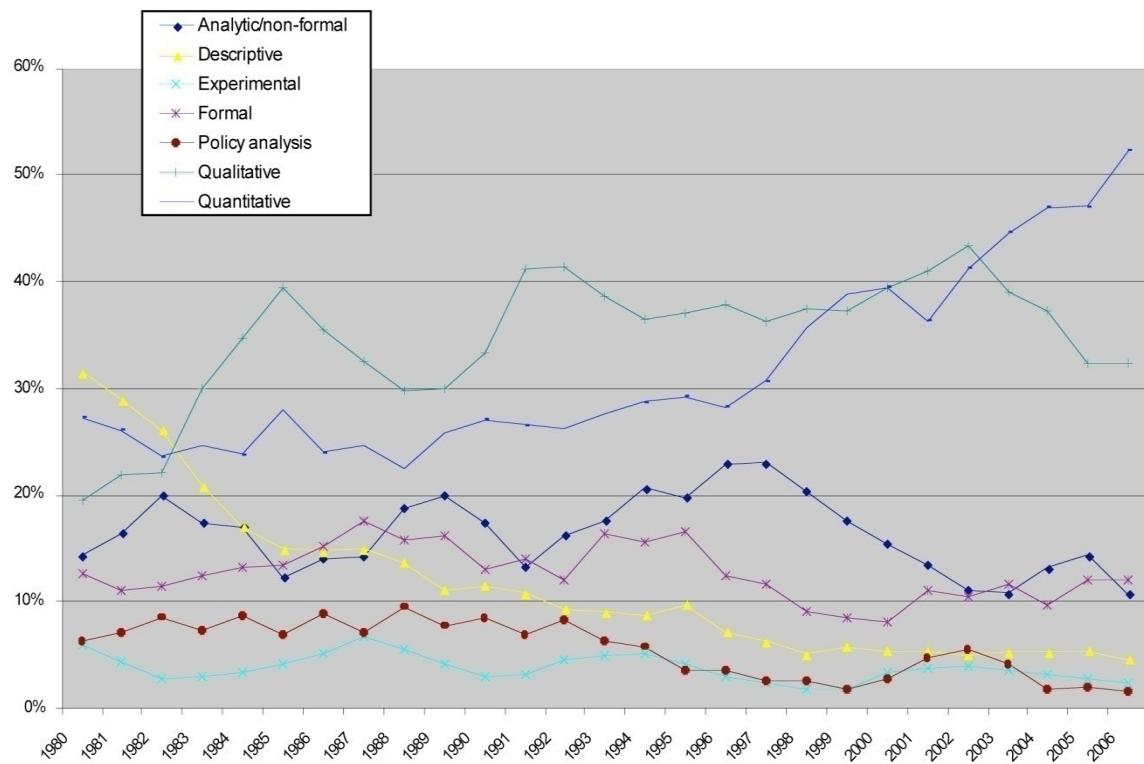
Persamaan misi antara konstruktivis dengan positivis di dalam HI menyebabkan konstruktivisme seakan mengemban misi untuk menyatukan antara pendekatan positivis dengan pendekatan post positivis. Di satu sisi mereka memiliki tujuan untuk menerangkan fenomena hubungan internasional secara obyektif, di sisi lain kelompok konstruktivis, yang percaya pada konsep *shared knowledge*, dihadapkan pada tugas untuk menganalisis pemahaman subyektif dari fenomena hubungan internasional.

Terlepas dari perdebatan metodologis ini, hasil penelitian TRIP dari sejumlah jurnal terkemuka menunjukkan bahwa penggunaan metode kuantitatif di dalam SHI mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian kualitatif merupakan metode populer kedua yang digunakan para penstudi HI walaupun, dari terdapat penurunan yang cukup tajam dari tahun 2002 hingga tahun 2006. Hal yang menarik untuk diperhatikan di dalam

⁴² Michael Barnett, “*Social Constructivism*” di dalam di dalam John Baylis, Steve Smith, Patrick Owens, 2008. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press.

penelitian TRIP adalah semakin berkurangnya penelitian deskriptif di dalam jurnal akademik yang terakreditas. Padahal metode deskriptif adalah metode terpopuler pada awal dekade 1980an.

Grafik 2: Jenis-jenis Metodologi yang Digunakan



Sumber: Daniel Maliniak, et al., 2007. *The International Relations Discipline, 1980-2006*, Makalah pertemuan tahunan American Political Science Association Agustus/September 2007, hal. 19

D. Di Mana Posisi SHI Sekarang?

Pembahasan sebelumnya telah memperlihatkan perkembangan keilmuan HI, baik dari segi epistemologi, ontologi dan metodologi. Tentunya akan timbul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dampak perkembangan keilmuan HI. Apa arti dari perdebatan di dalam SHI? Bagaimana posisi SHI di antara ilmu-ilmu sosial lainnya terutama ilmu politik sebagai ilmu induknya?

Pertama, terkait dengan arti perdebatan di dalam SHI. Pada tahun 1960 ketika seorang Martin Wight mempertanyakan keberadaan teori internasional di dalam tulisannya yang berjudul *Why is There No International Theory?*.⁴³ Inti dari tulisan Wight tersebut adalah mempertanyakan mengapa tidak ada teori yang menjelaskan tentang komunitas

43 Martin Wight, 1960. "Why is There No International Theory". *International Relations*, Vol. 2, Iss. 3

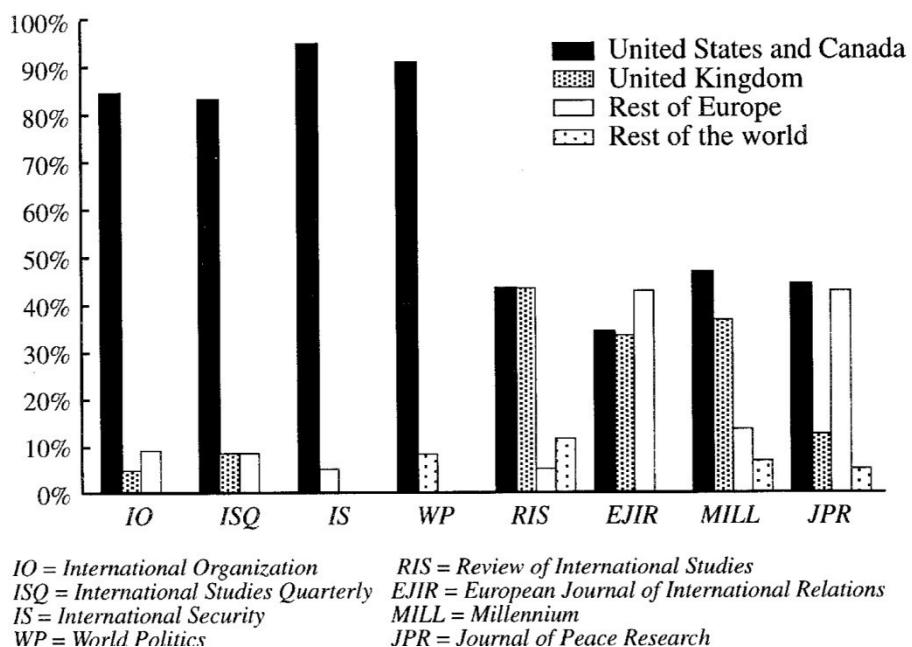
internasional (kumpulan negara) yang dapat menjadi penyeimbang dari teori politik yang mapu memberikan penjelasan tentang perilaku negara. Pertanyaan Wight setidaknya terjawab dengan melihat kondisi SHI lima dekade setelah tulisannya diterbitkan. Sejak SHI yang berdiri pada tahun 1919, SHI menjadi sebuah disiplin ilmu yang kaya akan teori, dimulai dari teori-teori yang dianggap sangat berpengaruh, seperti liberal internasionalisme dan neo realisme, Marxisme yang mulai kurang pengaruhnya, dan kumpulan teori-teori yang tergabung dalam post-positivisme seperti feminism dan *green politics*. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki menunjukkan bahwa SHI tidak lagi terkungkung pada masalah yang menjadi perhatian Wight pada dekade 1960an tentang “kemampuan negara untuk bertahan hidup dan ketiadaan kosa kata yang tepat dalam membuat teori tentang politik global”⁴⁴.

Apabila poin pertama dapat dikatakan sebagai nilai positif terhadap perkembangan SHI, maka jawaban dari pertanyaan kedua akan memperlihatkan kelemahan dari SHI. Perjalanan HI sebagai sebuah kajian yang terpisah dan memiliki kekhasan tersendiri dari ilmu politik telah membawa SHI sebagai ilmu yang didominasi oleh kelompok tertentu saja, dalam hal ini akademisi dari AS. Ole Waever bahkan menyebutkan bahwa SHI bukanlah kajian yang ‘internasional’ sifatnya karena dominasi akademisi dari AS dan Eropa.⁴⁵ Hal ini bisa terlihat dari jumlah akademisi HI dan terbitan jurnal HI yang memang lebih banyak berasal dari dua kawasan tersebut. Diagram berikut adalah contoh dari betapa besarnya gap antara akademisi HI yang berkontribusi di dalam jurnal-jurnal HI.

44 Burchill & Linklater, *op.cit.*, hal. 7

45 Ole Wæver, 1998. “The Sociology of Not So International Discipline”, *International Organization*, Vol. 52, No. 4. Untuk melihat gap antara akademisi HI secara keseluruhan baca tulisan James Long, et al. 2011. *The Global Study of International Relations*, disampaikan pada Pertemuan Tahunan ISA di Montreal, diakses dari <http://irtheoryandpractice.wm.edu/projects/trip/TRIP_World.pdf>, pada tanggal 9 November 2011

Diagram 2: Kontributor Tulisan di Jurnal-jurnal Terakreditasi pada Tahun 1995



Sumber: Ole Wæver, 1998. "The Sociology of Not So International Discipline", *International Organization*, Vol. 52, No. 4, hal. 699

Hal ini bisa dimaklumi terjadi karena pasca berakhirnya Perang Dunia II (dan lanjut hingga era Perang Dingin), AS memproyeksikan dirinya sebagai negara *superpower* di dunia dan para akademisi HI berkontribusi dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah AS melalui penelitian-penelitian 'saintifik'nya. Oleh karena itu pada masa-masa tersebut SHI sangat insular, dan ilmuwan HI di Barat (khususnya AS) menutup diri terhadap keberagaman komunitas HI yang lain.

Upaya untuk mengimbangi dominasi Barat di dalam SHI mulai terlihat ketika pasca Perang Dingin komunitas HI melihat ketidakrelevanannya teori-teori HI dalam menerangkan fenomena-fenomena HI di kawasan non Barat. Dalam hal ini Barry Buzan dan Wæver, termasuk ke dalam kelompok ilmuwan yang mengusung tema kewilayahannya atau regionalisme sebagai fokus kajian utama SHI pasca Perang Dingin. Menurut mereka analisis teoritis tentang wilayah penting karena "menurunnya penetrasi negara-negara *super power*" dan "berkurangnya pengaruh negara-negara super power dalam hal penguasaan militer dan kompetisi strategik di negara-negara lokal karena disibukkan dengan dinamika politik domestik"⁴⁶.

46 Barry Buzan & Ole Wæver, 2003. *Regions of Powers The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.

Patut untuk diperhatikan bahwa potensi untuk membuat teori HI non Barat itu ada, namun mengalami beberapa hambatan, antara lain karena beberapa hal: Pertama, terkait dengan kesenjangan antara kajian-kajian yang sifatnya kewilayahan yang disebut subsistemik dengan kajian-kajian yang sifatnya sistemik. Di dalam SHI kajian-kajian sistemik terkait dengan pembahasan realisme, liberalisme, *English School*, masyarakat internasional, globalisasi dan perekonomian dunia lebih mendapatkan perhatian dari pada kajian kewilayahan.⁴⁷

Kedua, ketertinggalan THI di dunia non Barat terkait dengan perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan teori hubungan internasional. Pada awal berdirinya Cina sebagai negara komunis misalnya, teori diartikan sebagai kebijakan dan strategi yang dikeluarkan oleh pemimpin sehingga sangat sedikit penelitian-penelitian yang terkait dengan kegiatan teorisasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan. Perubahan cara berpikir di Cina terkait dengan apa itu teori yang *knowledge-based* dan apa itu kebijakan baru terjadi sekitar akhir dekade 1980an.⁴⁸

Perbedaan persepsi bukan hanya mengenai apa itu teori, tapi juga tentang SHI secara keseluruhan. Contoh kasus adalah India. Behera berpendapat bahwa ketertinggalan THI di India terkait dengan kesalahpahaman tentang SHI yang dianggap sebagai ilmu tentang sesuatu yang asing, terjadi di luar India. Akibatnya, kurikulum SHI di India lebih banyak memfokuskan pada sejarah bangsa Eropa mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II dan Perang Dingin, dan juga pembahasan tentang diplomasi India dengan negara-negara luar. Perhatian terhadap perdebatan teoritis dan konsep-konsep penting di dalam SHI terbatas porsinya. Sempitnya pemahaman tentang ke-HI-an juga disebabkan oleh kebijakan yang menetapkan sub bidang ilmu HI seperti studi keamanan, ekonomi politik internasional, globalisasi, studi jender, hanya sebagai mata kuliah pilihan atau dianggap tidak perlu untuk ditawarkan.⁴⁹

47 Amitav Acharya, & Barry Buzan, ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.

48 Yaqing Qin, “Why is There No Chinese International Relations Theory” di dalam Acharya, A. & Buzan, B. ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.

49 Navnita Cadha Behera, “Reimagining IR in India” di dalam Acharya, A. & Buzan, B. ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.

Ketiga, ketertinggalan THI non Barat terkait dengan masih besarnya pengaruh Barat di beberapa tempat. Pengaruh ini bisa dilihat dari besarnya jumlah literatur Barat yang dijadikan buku teks HI, sementara buku-buku teks buatan lokal sangat terbatas jumlahnya. Pengaruh bentuk lain adalah seperti yang dirasakan oleh Korea Selatan saat ini. Salah satu alasan mengapa perkembangan THI di Korea Selatan sangat terhambat adalah karena Korea adalah wilayah yang sangat dipengaruhi oleh politik global. Mulai dari proses kolonialisasi, terpisahnya Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, aliansi antara Korea Selatan dengan AS dan proses rekonsiliasi antara Korea Utara dengan Korea Selatan, Korea Selatan masih dibayang-bayangi oleh kekuatan luar dalam menentukan kebijakannya sendiri.⁵⁰

Keempat, kondisi ketertinggalan THI non Barat juga ditentukan oleh infrastruktur pendidikan yang ada. Sebastian dan Lanti, yang menjadi kontributor dalam buku Acharya dan Buzan, mencermati perkembangan universitas yang menaungi jurusan hubungan internasional yang ada di Indonesia. Mereka menampilkan statistik jumlah jurusan HI yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah jurusan lain di Indonesia, termasuk juga terbatasnya universitas yang menawarkan program lanjutan (S2 ataupun S3) untuk jurusan HI. Hal menarik lain yang disampaikan oleh kedua penulis adalah ketertinggalan SHI di Indonesia juga terkait dengan perbandingan antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang tidak proporsional, besarnya beban kerja dosen dan kecilnya jumlah dosen HI yang mencapai tingkat doktor.⁵¹

Simpulan

Tulisan ini telah memberikan gambaran tentang perjalanan SHI sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki kekhususan tersendiri. Dari pembentukannya sebagai sebuah kajian yang terpisah dari ilmu politik pada tahun 1919, SHI telah banyak mengalami perubahan-perubahan secara keilmuan (epistemologi, ontologi maupun metodologi). Perbedaan-perbedaan cara pandang menunjukkan SHI bukan sebuah disiplin ilmu biasa. Perdebatan

50 Caeshung Chun, "Why is There No Non-Western International Relations Theory? Reflections on and from Korea" di dalam Acharya, A. & Buzan, B. ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.

51 Leonard C. Sebastian, & Irman G. Lanti, "Perceiving Indonesian Approaches to International Relations Theory" di dalam Acharya, A. & Buzan, B. ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.

paradigma (The Great Debates) adalah bukti kekuatan SHI dalam memberikan tawaran berbagai macam teori dalam memahami dan menjelaskan fenomena hubungan internasional.

Di dalam tulisan ini juga ditunjukkan bahwa SHI memiliki kelemahan, di mana kajian ini sangat didominasi oleh akademisi dari AS dan dari Eropa. Ketidakcocokan teori-teori Barat dalam menjelaskan fenomena-fenomena HI di kawasan non Barat memunculkan upaya-upaya untuk membuat teori HI non Barat. Namun upaya ini belum menghasilkan sesuatu yang berarti, mengingat masih besarnya dominasi teori-teori Barat di dalam SHI walaupun potensi untuk memunculkan teori HI non Barat itu ada.

Daftar Pustaka

- Amitav Acharya, & Barry Buzan, ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.
- Barry Buzan & Ole Waever, 2003. *Regions of Powers The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Caeshung Chun, “Why is There No Non-Western International Relations Theory? Reflections on and from Korea” di dalam Acharya, A. & Buzan, B. ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.
- Chris Brown, 2001. Understanding International Relations, 2nd ed., New York: Palgrave.
- Daniel Maliniak, et al., 2007. *The International Relations Discipline*, 1980-2006, Makalah pertemuan tahunan American Political Science Association Agustus/September 2007.
- Department of International Politics, 2011. *The Legacy of One Man's Vision*, University of Aberystwyth, diakses dari <<http://www.aber.ac.uk/en/interpol/about/>>, pada tanggal 5 November 2011.
- J.C. Johari, 1985. *International Relations and Politics (Theoretical Perspectives)*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Leonard C. Sebastian, & Irman G. Lanti, “Perceiving Indonesian Approaches to International Relations Theory” di dalam Acharya, A. & Buzan, B. ed. 2010, *Non-*

- Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.
- Lucian M. Ashworth, 2002. "Did the Realist-Idealist Great Debate Really Happen? A Revisionist History of International Relations", *International Relations*, Vol. 16, No. 1.
- Martin Wight, 1960. "Why is There No International Theory". *International Relations*, Vol. 2, Iss. 3.
- Michael Barnett, "Social Constructivism" di dalam di dalam John Baylis, Steve Smith, Patrick Owens, 2008. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press.
- Morton A. Kaplan, 1966. "The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations", *World Politics*, Vol. 19, No. 1.
- Navnita Cadha Behera, "Reimagining IR in India" di dalam Acharya, A. & Buzan, B. ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.
- Ole Waever, 1998. "The Sociology of Not So International Discipline", *International Organization*, Vol. 52, No. 4. Untuk melihat gap antara akademisi HI secara keseluruhan baca tulisan James Long, et al. 2011. *The Global Study of International Relations*, disampaikan pada Pertemuan Tahunan ISA di Montreal, diakses dari <http://irtheoryandpractice.wm.edu/projects/trip/TRIP_World.pdf>, pada tanggal 9 November 2011.
- Rizal Sukma, 1995. *Hubungan Internasional Dekade 1990-an: Hegemoni, Dekonstruksi, dan Agenda*, Jurnal Ilmu Politik No. 15.
- Robert Jackson & Georg Sørensen, 1999. *Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press.
- Scott Burchill & Andrew Linklater, 1996. *Theories of International Relations*, London: Macmillan Press.
- Scott Burchill, et al., *Theories of International Relations*, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan.
- Stephen Hobden & Richard Wyn Jones, "Marxist Theories of International Relations" di dalam John Baylis, Steve Smith, Patrick Owens, 2008. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press.
- Steven L. Lamy, "Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism" di dalam John Baylis, Steve Smith, Patrick Owens, 2008. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press.

Suwardi Wiriatmadja, 1967. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Surabaya: Penerbit Tinta Mas, lihat juga Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A Simmons, 2002. *Handbook of International Relations*, London: SAGE Publications Ltd.

Yaqing Qin, “Why is There No Chinese International Relations Theory” di dalam Acharya, A. & Buzan, B. ed. 2010, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on Beyond Asia*. New York: Routledge.